Vol. 2, No. 6 November 2022, Hal. 1793-1798
DOI: https://doi.org/10.54082/jamsi.547

# Reviu Laporan Keuangan Tahunan Koperasi Simpan Pinjam Kota Ambon

**Jefry Gasperz*[1], Christina Sososutiksno[2], Franco Benony Limba[3], Paskanova Ch. Gainau[4], Shella Gilby Sapulette[5*], Jabida Latuamury[6]**

[1,2,3,4,5,6]Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia
*e-mail: je66er@yahoo.co.id[1], chr_sososutiksno@yahoo.com[2], francob.limba@gmail.com[3], paskanova@gmail.com[4], ellasapulette88@gmail.com[5], jabida.latuamury@gmail.com[6]

***Abstrak***

*Koperasi merupakan organisasi yang didirikan guna membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga mensejahterakan anggotanya. Sebagai sebuah organisasi, koperasi diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan kinerja koperasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta sebagai sumber informasi bagi pengambilan keputusan. Namun, ditemui bahwa banyak koperasi yang belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku serta beberapa kesalahan yang dibuat dalam penyusunan laporan keuangan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam Kota Ambon yang dilaksanakan selama tiga hari. Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk melakukan Reviu atas laporan keuangan serta memberikan rekomendasi atas temuan-temuan. Kegiatan ini dimulai dengan melakukan rapat koordinasi bersama pengurus koperasi setelah itu dilakukan proses reviu. Hasil reviu dibuat dalam sebuah laporan untuk proses evaluasi. Hasil reviu menunjukan masih lemahnya sistem pengendalian internal dalam koperasi dan juga terdapat kesalahan pencatatan, pengakuan transaksi serta pelaporan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan.*

***Kata kunci:*** *Koperasi Simpan Pinjam, Laporan Keuangan, Reviu*

***Abstract***

*Cooperatives are organizations established to assist the government in improving the community's economy and also the welfare of its members. As an organization, cooperatives are required to compile financial reports that are used to account for the performance of cooperatives to interested parties and as a source of information for decision-making. However, it was found that many cooperatives have not been able to compile financial reports according to applicable standards and some errors have been made in the preparation of financial statements. This community service activity was carried out at the Ambon City Savings and Loan Cooperative which was held for three days. The purpose of this activity is to review the financial statements and provide recommendations on the findings. This activity was started by holding a coordination meeting with the cooperative management, after which a review process was carried out. The results of the review are made in a report for the evaluation process. The results of the review show that the internal control system in the cooperative is still weak and there are also errors in recording, acknowledging transactions, and reporting that are not following financial accounting standards.*

***Keywords:*** *Financial Statements, Savings and Loan Cooperatives, Review*

## 1. PENDAHULUAN

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (UU No. 25 Tahun 1992). Koperasi dalam kegiatannya memiliki dua fungsi yang khas yaitu koperasi dapat berfungsi dalam bidang ekonomi dan bisa juga berfungsi dalam bidang sosial, artinya koperasi selain bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan adanya koperasi juga dapat memberikan dampak sosial bagi masyarakat.

Di Indonesia terdapat berbagai jenis koperasi salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam. Secara ringkas, koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya.

Dalam melakukan usahanya, koperasi simpan pinjam memiliki modal yang berasal dari dua (2) sumber. Sumber pertama diperoleh dari simpanan anggota koperasi, baik yang bersifat simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela atupun hibah. Sumber kedua dapat diperoleh dari modal pinjaman kepada badan usaha atau koperasi lainnya.

Koperasi sebagai badan usaha yang memiliki prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya baik oleh anggota koperasi khususnya maupun oleh masyarakat pada umumnya (Peraturan Menteri Negara KUKM RI Nomor: 04/PER/M.KUKM/VII/2012). Berhasil tidaknya pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut diukur melalui penyelenggaraan akuntansi secara benar dan tertib melalui pelaporan keuangan sesuai standar yang ditetapkan (Adiputra, dkk, 2017). Laporan keuangan yang baik memudahkan investor dan calon investor menilai kondisi keuangan perusahaan dan pihak eksekutif mampu menjelaskan kondisi keuangan perusahaannya (Wardani dan Andriyani, 2017).

Standar Akuntansi Keuangan EMKM merupakan standar pelaporan akuntansi yang dianjurkan kepada entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal (IAI, 2016). Koperasi sebagai unit usaha yang menyajikan laporan keuangan kepada pemakai laporan keuangan koperasi yaitu anggota koperasi, pengurus, pengawas serta stakeholder lain (pemerintah, kreditur dan pihak lain yang berkepentingan) harus menerapkan SAK EMKM dalam pelapran keuangan. Ketentuan umum mengenai kepatuhan terhadap SAK EMKM mengacu pada PERMEN KUKM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Akuntansi Koperasi Sektor Riil dimana laporan keuangan koperasi harus memenuhi ketentuan dalam penyajian kualitatif laporan keuangan diantaranya adalah kepatuhan terhadap standar SAK EMKM yang harus dinyatakan secara eksplisit dan secara penuh dalam catatan atas laporan keuangan.

Permasalahan yang dihadapi oleh koperasi simpan pinjam saat ini adalah (a) Sejak dididrikan, tidak pernah dilakukan pemeriksaan baik audit maupunrReviu terhadap laporan keuangan sehingga laporan keuangan dibuat secara bebas tanpa mengikuti standar keuangan yang ada; dan (b) Kinerja yang dirasa menurun selama pandemi dan diduga terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh pegawai. Sehingga perlu dilakukannya proses reviu atas laporan keuangan. Tujuan dilakukannya PKM ini adalah untuk memberikan reviu dan rekomendasi atas laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Ekonomi Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

## 2. BAHAN DAN METODE

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa tahapan pelaksanaan program pengabdian masyarakat. Hal ini tampak pada diagram alur berikut:

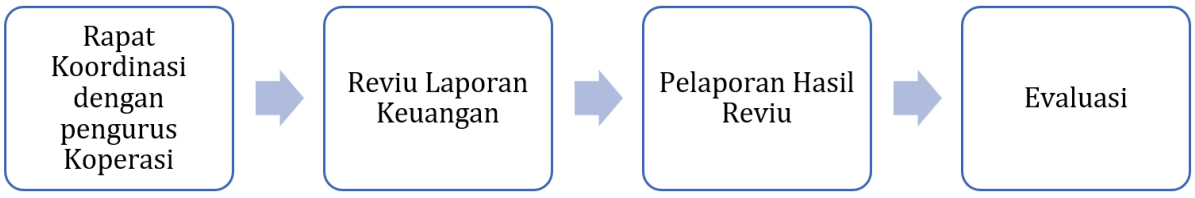


Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan PKM

Untuk mendapatkan hasil yang memadai, reviu perlu dirancang dengan baik pada tiap tahapannya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan reviu.

### 2.1. Tahapan Perencanaan Reviu

Tahapan perencanaan reviu diawali dengan melakukan pemahaman proses bisnis terhadap objek yang akan direviu dan koordinasi secara intensif dengan Pimpinan universitas dan pihak terkait. Pemahaman yang dimaksud meliputi: (1) LK Triwulanan/Semesteran/Tahunan untuk periode berjalan atau periode sebelumnya; (2) Hasil reviu dan/atau audit atas LK

sebelumnya; (3) Struktur koperasi dan penyelenggaraan akuntansi, termasuk kompetensi pegawai yang menangani; (4) Peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan operasional; (5) Standar Akuntansi Pemerintahan, Kebijakan Akuntansi, dan Sistem Akuntansi LK beserta aturan terkait lainnya

### 2.2. Tahapan Pelaksanaan Reviu

Kegiatan yang tercakup pada tahap ini meliputi: (1) Pengumpulan Data dan/atau Informasi. Pereviu perlu mempertimbangkan metode pengumpulan data dan/atau informasi yang efektif untuk mendukung pelaksanaan reviu secara optimal; (2) Penelaahan Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan; (3) Penyusunan Kertas Kerja Reviu Penyusunan Kertas Kerja Reviu merupakan pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan reviu atas LK, maka pereviu harus menyusun Kertas Kerja Reviu (KKR).

### 2.3. Prosedur Pelaksanaan Reviu

Prosedur pelaksanaan reviu berisi serangkaian langkah yang dilaksanakan oleh pereviu dalam menelaah penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK, yang meliputi: (1) Prosedur Reviu Neraca; (2) Prosedur Reviu Laporan Laba Rugi; (3) Prosedur Reviu Laporan Perubahan Ekuitas; (4) Prosedur Reviu Laporan Arus Kas; dan (5) Prosedur Reviu CaLK dan Lampiran LK.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini berlangsung pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Ambon. Kegiatan Reviu ini berlangsung selama tiga hari sejak 04 s/d 06 April 2022. Peserta dari kegiatan ini adalah pengelola Koperasi Simpan Pinjam dengan menggunakan tahun anggaran 2021 sebagai bahan Reviu laporan keuangan. Pada tahap awal, dilakukan rapat pengurus bersama dengan tim PKM guna membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi serta proses Reviu yang akan dilakukan dan apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan Reviu.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan ditemui bahwa laporan keuangan per 31 Desember 2021 telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK EMKM khususnya Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Arus Kas, sedangkan Laporan Ekuitas, dan Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan belum disajikan sesuai SAK EMKM. Kegiatan reviu dilakukan atas catatan kas (sistem) yang dibandingkan dengan pemeriksaan terhadap kas fisik di kasir, reviu terhadap piutang, reviu terhadap aset lainnya, reviu terhadap hutang jangka pendek, reviu terhadap modal, reviu terhadap laba rugi, dan reviu lainnya.

Gambar 2. Proses Reviu

Proses Reviu dilakukan dengan mengumpulkan data dan/atau informasi, penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK serta penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yg diperlukan.

Vol. 2, No. 6 November 2022, Hal. 1793-1798
DOI: https://doi.org/10.54082/jamsi.547

Gambar 3. Pengumpulan Data dan Informasi

Gambar 4. Stock Opname

Hasil reviu menunjukkan beberapa temuan terkait dengan penyusunan laporan keuangan diantaranya adalah (1) Banyak transaksi yang dicatat dan diakui tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; (2) Pencatatan transaksi tidak didukung oleh dokumen bukti yang jelas; (3) Adanya perbedaan nilai yang tercatat dan terhitung; dan (4) Lemahnya sistem pengendalian internal dalam koperasi, serta beberapa kesalahan teknis lainnya. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka diberikan rekomendasi guna memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Berikut Tabel 1 menjelaskan tentang temuan dan rekomendasi yang diberikan.

Gambar 5. Evaluasi

Laporan keuangan koperasi merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi diterbitkan setidaknya sebulan sebelum rapat anggota tahunan (RAT) (Rifany & Yuliati, 2021) Laporan ini menyajikan perjalanan sejarah sebuah entitas yang dikualifikasikan dalam nilai moneter. Informasi pada laporan keuangan digunakan untuk pengambilan keputusan, sehingga laporan keuangan perlu disusun dengan benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat, andal, relevan dan tepat waktu (Oktaviyanti, Herawati and Atmadja, 2017).

Vol. 2, No. 6 November 2022, Hal. 1793-1798
DOI: https://doi.org/10.54082/jamsi.547

Tabel 1. Temuan dan Rekomendasi

| Permasalahan | Keterangan |
|---|---|
| Terdapat beberapa transaksi, baik pengeluaran, pemasukan serta selisih kas yang ada belum **diinput** kedalam sistem | • Kasir bertanggung jawab menginput semua transaksi penarikan dan setoran serta biaya – biaya dan pindah buku lainnya ke dalam sistem agar terbaca setiap hari kerja.<br>• Pembuatan spesifikasi kas harian dan/atau mingguan untuk di laporkan dan di setujui (tandatangani) oleh manajer.<br>• Pengawasan Kas dilakukan secara berkala oleh Manajer, Pengurus dan Pengawas dan diarsipkan sebagai bukti pengendalian internal koperasi |
| Terdapat perbedaan total saldo yang tercatat dan yang terhitung, selain itu terdapat ketidak sesuaian prosedur atau ketidaklengkapan pemenuhan syarat pemberian pinjaman ke pada anggota dan non anggota. | • Diperlukan Penertiban administrasi pemberian pinjaman yang di mulai dari surat permohonan, nota analisa, perjanjian kredit, bukti potongan, bukti surat penagihan resmi atau bukti tanda macet dari debitur dan stakeholder lainnya.<br>• Dilakukan Penagihan dengan pendekatan lainnya agar menutupi kerugian pinjaman macet |
| Beberapa transaksi yang nilainya tidak diakui dan dicatat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. | • Melakukan transaksi akuntansi yang benar sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi berterima umum. |
| Beberapa transaksi peminjaman yang tidak memiliki bukti setoran dan penarikan yang lengkap, selain itu terdapat slip transaksi yang tidak ditanda tangani oleh manajer | • Penertiban administrasi pencatatan slip setoran, penarikan, pindah buku<br>• Penertiban fungsi manajer sebagai pengendalian internal atas untuk memverifikasi semua transaksi setiap hari dan/atau setiap minggu<br>• Peneritiban bukti-bukti transaksi simpanan berjangka, dan menghubungi pemilik simpanan berjangka untuk administrasi tandatangan dll |
| Lemahnya sistem pengendalian internal dalam koperasi, | • Meningkatkan sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya masalah kedepannya. |

Setiap organisasi baik swasta maupun pada sektor publik pernah mengalami masalah terkait dengan pelaporan keuangan, begitu juga dengan organisasi yang bergerak dalam usaha koperasi simpan pinjam. Sehingga, dengan adanya kegiatan PKM ini diharapkan mampu memberikan saran dan rekomendasi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dalam penyusunan dan pertanggungjawaban laporan keuangan, sehingga koperasi mampu untuk melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan, pencatatan hingga penyusunan dan pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pentingnya penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan baik anggota maupun masyarakat kepada koperasi.

## 4. KESIMPULAN

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahaan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi. Proses reviu yang dilakukakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dari koperasi simpan pinjam. Kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi yang mampu memberikan suatu informasi keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan dating (Putri, 2022). Berdasarkan

hasil reviu, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal dalam koperasi masih terbilang lemah, hal ini ditunjukan dengan beberapa temuan terkait dengan kurangnya bukti-bukti pendukung atas transaksi yang dilakukan. Selain itu, lemahnya pengelolaan Kas, pengelolaan Piutang Usaha, Aset Lain, Hutang Jangka Pendek, Modal, dan hal lainnya baik dari sistem dan pencatatannya menjadi temuan utama dalam proses reviu. Walaupun dari sisi materialitas terbilang kecil namun tetap harus ditindaklanjuti dan diperbaiki oleh manajemen atau pengelola koperasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua, pengurus, dan anggota serta karyawan koperasi simpan pinjam di Kota Ambon yang telah bekerja sama guna mensukseskan kegiatan pengabdian ini.

## DAFTAR REFERENSI

Adiputra, I Made S., Sinarwati, Ni Kadek dan Purnamawati, G. A. (2017) Pengaruh Pemahaman Akuntansi Berbasis SAK-ETAP, Kualitas Pelatihan, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi (Studi Empiris Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Karangasem). e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan Akuntansi Program S1. 8 (2)

Oktaviyanti, Herawati dan Atmadja. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Budaya Etis Organisasi Terhadap KualitasLaporan Keuangan (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Di Kecamatan Buleleng)'. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1), 8(2). https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04/PER/M.KUKM/VII/2012 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi. Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil, Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia.

Putri, Rita D. (2022). Reviu Laporan Keuangan dan Penerapan SAP Berbasis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Journal of Innovation Research and Knowledge, 2(1), 39-48. https://doi.org/10.53625/jirk.v2i1

Rifany, F. F. dan Yuliati, Anik. (2021). Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi dengan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi), 5 (2). 332-344. https://doi.org/10.54783/mea.v5i2

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Wardani, D. K. dan Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. Jurnal Akuntansi, 5(2), 88–98. https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270